

ABSTRAK JURNAL

KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TERKAIT ADANYA PELANGGARAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

Ina Nabila Punsu, Robinsar Marbun

Abstrak

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah mengawasi setiap proses tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. Setiap wewenang yang dimiliki dalam sebuah lembaga akan menimbulkan tanggung jawab di dalamnya. Demikian tanggung jawab yang dimiliki oleh KASN terkait adanya pelanggaran pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang marak terjadi di Indonesia. Pemberian sanksi yang selama ini dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dinilai belum terlihat hasil yang memuaskan, hal ini disebabkan adanya faktor koneksi politik, kekeluargaan, kesamaan almamater maupun kesamaan daerah. Metode penelitian yang dilakukan ialah metode yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa KASN hanya menjalani fungsi pengawasan yang hanya berhak untuk memberikan rekomendasi kepada PPK atas adanya pelanggaran pengisian JPT, untuk itu penulis memberikan saran agar KASN dapat diperluas kewenangannya dengan mempertimbangkan kasus-kasus pelanggaran pengisian JPT yang marak terjadi

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Jabatan Pimpinan Tinggi, Komisi Aparatur Sipil Negara.

Abstract

One of the authorities had by State Civil Service Commission (KASN) is to supervise every step process in the filling the High Command Position. Every authority had in a particular institution raises responsibility in it. Therefore, KASN has responsibility regarding the violation in the filling of the High Command Position. The sanctioning conducted by the Staffing Administrator Attendant (PPK) is considered relatively unsatisfactory because of the connection factors of politics, family, same alma mater, and the same district. The researcher used the normative juridical method in this research. The conclusion of this research showed that KSN only performed supervisory functions, which only allowed to give PPK recommendations regarding the violation in the filling of the High Command Position. Therefore, the researcher suggests that the authority of KASN should be expanded by considering the cases of the violation in the filling of the High Command Position that frequently happens

Key Words: State Civil Service, High Command Position, State Civil Service Commission.